

LAPORAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
(GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE)  
PELAKSANAAN GCG

PT BPR ASIA SEJAHTERA

**2023**

# DAFTAR ISI

## **BAB I : PENJELASAN UMUM**

Tata Kelola Perusahaan .....	1
------------------------------	---

## **BAB II : TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	4
B. Kepemilikan Saham Direksi .....	6
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR .....	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain .....	7
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR .....	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	7
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	8
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris .....	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR .....	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	8
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR .....	9
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	9
F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	9

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	9
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	10
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....	10
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	11
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun .....	11
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	11
I. Jumlah Penyimpangan Internal ( Internal Fraud ) .....	12
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi .....	12
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	13
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....	13

LAMPIRAN LAPORAN PENILAIAN ( SELF ASSESSMENT ) PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)**

Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan dimana menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai *Good Corporate Governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis berkepanjangan. Akibatnya banyak bisnis perusahaan terpuruk dalam kancah perdagangan termasuk runtuhnya kinerja-kinerja perusahaan. Banyak Pihak mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dikarenakan lemahnya *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian cukup signifikan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Sistem Tata Kelola perusahaan di anggap sebagai salah satu faktor penting dari pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan.

Pelaksanaan Tata Kelola oleh bank bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi bank, memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya, mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif, melindungi kepentingan stakeholders, mendukung penetapan kebijakan BPR yang didasari oleh prinsip-prinsip tata kelola.

Salah satu cara untuk menilai sistem kerja suatu bank adalah melalui penilaian *Good Corporate Governance* atau GCG. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen PT BPR Asia Sejahtera untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

## **BAB II**

### **TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

#### **A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

Penerapan tata kelola terhadap Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera per 31 Desember 2023 masing-masing berjumlah 2 orang.

#### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

Nama : KUMALA DEWI

NIK :

Jabatan : Direktur Utama

Nama : KELLY

NIK :

Jabatan : Direktur ( yang membawahkan Fungsi Kepatuhan )

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktur Utama sebagai berikut :

Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Dalam hal pelaksanaan proses audit baik internal maupun eksternal, Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, dan fungsi Kepatuhan termasuk menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Direksi wajib memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai. Direksi berkewajiban menyediakan data dan informasi yang

akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi.

Tugas dan Tanggungjawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sama dengan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama yang dijelaskan diatas, namun ada beberapa hal tambahan terkait tugas dan tanggungjawab Direktur seperti menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, serta memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, maka Direktur berkewajiban mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2023, Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah menjalankan tugas dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan berfokus pada hal-hal berikut :

- a. Mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
- b. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit.
- c. Mengambil langkah untuk pemberian penyaluran kredit terhadap jenis kredit dan bidang usaha yang lebih prospektif, BPR lebih focus ke kredit konsumtif terutama KKB Mobil untuk tahun 2023.

- d. Memperhatikan debitur berkolektibilitas DPK agar tidak masuk ke dalam peningkatan NPL dan menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA yang melebihi 1 (satu) tahun dan yang akan jatuh tempo.
- f. Memantau pembayaran debitur yang sudah melakukan restrukturisasi pasca berakhirnya POJK stimulus.
- g. Meningkatkan kemampuan analisa kredit kepada seluruh jenjang yang berkaitan terutama terhadap debitur yang plafon di atas Rp 500 juta yang mempengaruhi profil resiko kredit BPR.
- h. Memantau dan memperhatikan 25 debitur terbesar.
- i. Mengingatkan kepala bagian ke atas pada setiap kali briefing untuk meminimalisir faktor manusia Human Error yang timbul sebagai salah satu cara peningkatan kualitas SDM dan menghindari adanya temuan berulang oleh PE Audit Intern.
- j. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- k. Mengawasi kegiatan operasional BPR dan melakukan dual control sebagai salah satu cara untuk Penerapan Strategi Anti Fraud.
- l. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap vendor sistem untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem.
- m. Memantau penerapan APU, PPT, dan PPSPM dalam kegiatan operasional BPR.
- n. Menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainya

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

Nama : KIM HAN  
NIK :  
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : MERI  
NIK :  
Jabatan : Komisaris

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut :

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar BPR. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, dan/atau otoritas lainnya. Dewan komisaris wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

- a. Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
- b. Direksi agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit
- c. Direksi agar dapat mengambil langkah untuk pemberian penyaluran kredit terhadap jenis kredit dan bidang usaha yang lebih prospektif.

- d. Agar dapat memperhatikan debitur berkolektibilitas DPK agar tidak masuk ke dalam peningkatan NPL dan menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh.
- e. Direksi diharapkan agar dapat menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA yang melebihi 1 (satu) tahun dan yang akan jatuh tempo.
- f. Direksi agar dapat memantau pembayaran debitur yang sudah melakukan restrukturisasi pasca berakhirnya POJK stimulus.
- g. Agar dapat meningkatkan Analisa kredit yang lebih mendalam terutama terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki persentase kegagalan bayarnya tertinggi dibanding sektor ekonomi lainnya.
- h. Agar dapat menjadi perhatian untuk kredit 25 debitur terbesar dimana apabila salah satu mengalami gagal bayar maka akan mempengaruhi kenaikan NPL yang signifikan.
- i. Meminimalisir Faktor Manusia ( Human Error ). Human error memang tidak berdampak finansial bagi BPR, namun tetap menjadi perhatian Bank untuk meningkatkan kualitas SDM yang memadai dan menghindari temuan berulang oleh PE Audit Intern.
- j. Agar dapat memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit
- k. Direksi diharapkan dapat melakukan Penerapan Strategi Anti Fraud.
- l. Agar dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap vendor sistem untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem.
- m. Direksi diharapkan untuk terus melakukan pemantauan atas penerapan APU, PPT, dan PPSPM di BPR.
- n. Direksi agar dapat memantau dalam menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kumala Dewi		-	-
2.	Kelly		-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kumala Dewi		-	-	-
2.	Kelly		-	-	-

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kumala Dewi		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Kelly		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kumala Dewi		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Kelly		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kim Han		-	-
2.	Meri		Rp 1.000.000.000,-	20%

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kim Han		-	-	-
2.	Meri		602607	PT. BPR Central Sejahtera	10%
			-	PT. Energi Sejahtera	10%
			-	PT. Bintang Sumber Sejahtera	10%
			-	PT. Tajelin Sejahtera	9,54%

### E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kim Han		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Meri		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

#### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kim Han		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Meri		Tidak Ada	Tidak Ada	Sukarni - Pemegang Saham (kakang kandung)

### F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

#### 1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	861.000.000	2	560.880.000
2.	Tunjangan	2	462.434.080	2	307.598.352
3.	Tantiem	2	48.000.000	1	11.300.000

4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1.371.434.080</b>		<b>879.778.352</b>	

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	2 unit mobil dinas	-
3.	Asuransi Kesehatan	11.520.000,00	5.760.000,00
4.	Fasilitas Lainnya	10.200.000,00	-

**G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,17 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,79 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,85 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,75 : 1

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	16 Januari 2023	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Oktober - Desember 2022
2	19 April 2023	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Januari - Maret 2023
3	21 Juli 2023	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari April - Juni 2023
4	24 Oktober 2023	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Juli - September 2023
5	01 Desember 2023	2	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2024

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Kim Han		5	-	100 %
2	Meri		5	-	100 %

### I. Jumlah Penyimpangan Internal ( Internal Fraud )

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	0	-

BPR belum terdapat permasalahan hukum pada tahun 2023.

**K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Ket
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
<b>NIHIL</b>									

**L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

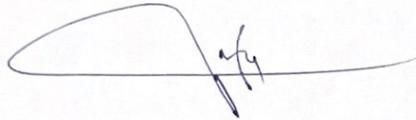
No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1.	25 Juli 2023	Sumbangan Dana	Sumbangan untuk pembangunan sekolah	Sekolah Sion	Rp 13.000.000,-
2.	03 dan 04 Agustus 2023	Bakti Sosial	Pembagian sembako untuk masyarakat yang membutuhkan	Masyarakat kurang mampu dan lansia	Rp 2.368.600,-

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Asia Sejahtera  
Alamat : Jl D.I.Panjaitan Km 9 no 1-2  
Kota/Kabupaten : Kota Tanjungpinang  
Sandi BPR : 602685  
Tahun Laporan : 2023

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera Tahun 2023

Tanjungpinang, 09 Januari 2024



**Kim Han, S.E.**  
**Komisaris Utama**



**Kumala Dewi, S.E.**  
**Direktur Utama**

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,225	0,182	-	0,100	0,157	0,123	0,025	0,152	0,075	0,088	0,075	<b>1,20</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Sangat Baik</b>											

Kesimpulan	
Faktor 1	<p><b>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 1 secara garis besar telah terpenuhi. Yang menjadi perhatian BPR adalah peningkatan kinerja BPR dalam penurunan AYDA.</p>
Faktor 2	<p><b>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 2 secara garis besar telah terpenuhi.</p>
Faktor 3	<p><b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b> Penerapan pada Faktor 3 belum diterapkan karena PT. BPR Asia Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 80.000.000.000,- sehingga tidak diwajibkan membentuk komite.</p>
Faktor 4	<p><b>Penanganan Benturan Kepentingan</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 4 secara keseluruhan telah terpenuhi dan sampai dengan saat ini belum terdapat benturan kepentingan.</p>
Faktor 5	<p><b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 5 secara garis besar telah terpenuhi. Yang menjadi perhatian BPR adalah pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh jenjang perlu diterapkan lebih maksimal.</p>
Faktor 6	<p><b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 6 secara garis besar telah terpenuhi. Proses penerapan dalam meningkatkan mutu keterampilan secara berkala harus dimaksimalkan meskipun melalui daring.</p>
Faktor 7	<p><b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 7 secara keseluruhan telah terpenuhi.</p>
Faktor 8	<p><b>Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 8 sebagian besar telah terpenuhi. Yang menjadi perhatian BPR adalah penerapan yang lebih maksimal dalam proses pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.</p>
Faktor 9	<p><b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 9 secara keseluruhan telah terpenuhi.</p>
Faktor 10	<p><b>Rencana Bisnis BPR</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 10 sebagian besar telah terpenuhi.</p>
Faktor 11	<p><b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b> Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 11 secara keseluruhan telah terpenuhi.</p>

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR ASIA SEJAHTERA**

Nama BPR : PT. BPR Asia Sejahtera  
Posisi : Desember 2023

<b>Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
1,2	Sangat Baik
<b>Analisis</b>	
<p>Penerapan tata kelola PT. BPR Asia Sejahtera pada tahun 2023 secara garis besar telah terpenuhi. Dalam proses penerapan tata kelola tentang pelaksanaan sosialisasi oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan peningkatan mutu keterampilan secara berkala melalui pelatihan yang sebelumnya terhambat dikarenakan pandemi COVID-19, sudah mulai dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Selain itu, kinerja BPR 2023 terkait penyelesaian AYDA belum terealisasi secara maksimal, namun dibidang penyaluran kredit, laba dan aset mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Pemenuhan risiko likuiditas akan menjadi perhatian kedepannya agar penghimpunan dana dan penyaluan kredit berbanding lurus sehingga tidak ada rasio yang timpang antara satu dan lainnya.</p> <p>Action plan penyempurnaan pelaksanaan GCG sebagai tindak lanjut atas hasil <i>self assessment</i> adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan Manajemen Resiko yang lebih maksimal</li><li>2. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi ketentuan baru kepada seluruh jenjang organisasi untuk memaksimalkan pemahaman terhadap ketentuan.</li><li>3. Optimalisasi peningkatan mutu keterampilan dan kualitas individu seluruh SDM.</li><li>4. Meminimalisir terjadinya turnover untuk tahun 2024 agar manajemen bisa berfokus pada pendidikan dan pelatihan para karyawan baru agar bisa memberikan kinerja yang maksimal untuk BPR.</li></ol>	



PT. BPR Asia Sejahtera telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan PT. BPR Asia Sejahtera akan terus berusaha untuk meningkatkan penerapan GCG agar dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dapat sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut. Predikat komposit “**Sangat Baik**” yang diperoleh merupakan suatu wujud nyata Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap GCG dalam tata kelola perusahaan yang telah dilakukan selama ini, serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders*.

Tanjungpinang, 09 Januari 2024

PT. BPR Asia Sejahtera



KIM HAN, S.E.

Komisaris Utama



KUMALA DEWI, S.E.

Direktur Utama